

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih menghadapi persoalan kemiskinan dan termasuk negara yang masih rentan dengan kemiskinan (Septiadi dan Nursan, 2020). Data penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2022 mencapai 26.363,27 ribu jiwa (9,57 persen).

Menurut Badan Pusat Statstika (2021) kemiskinan adalah keadaan ekonomi ketika individu atau masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya dalam hal pengeluaran. Kemiskinan (kualitas hidup yang rendah) menjadi masalah yang selalu dihadapi negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Di negara Indonesia, banyak lagi orang miskin yang ditandai dengan masih banyak yang tidak memiliki kebutuhan dasar dan masih banyak yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan terjebak dalam kemiskinan. Maka bukan hal aneh apabila sampai saat ini kemiskinan di Indonesia masih bertahan. Kemiskinan bisa terjadi karena sifat malas atau tidak giat dalam bekerja. Maka penting untuk meluruskan kembali pola pikir masyarakat guna meraih kesejahteraan hidup.

Gunawan (2000) mengelompokkan faktor-faktor penyebab kemiskinan menjadi dua. Pertama, Kemiskinan yang terjadi yang disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor yang diluar jangkauan individu. Kondisi masyarakat yang di sebut miskin dapat diketahuo berdasarkan kemampuan pendapatan yang memenuhi standart hidup (Nugroho, 1995). Kedua, Pada prinsipnya tersebut, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar mencukupi kebutuhan pangan, tetapi juga tercukupinya kebutuhan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standart hidup ataupun standart kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan hidupnya.

Bangsa Indonesia sejak merdeka sudah berupaya untuk mengurangi kemiskinan namun hasilnya jauh dari memuaskan. Hal ini di sebabkan oleh berbagai faktor yaitu tingkat investasi yang masih dibawah standart, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat (Elyani, 2010). Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di

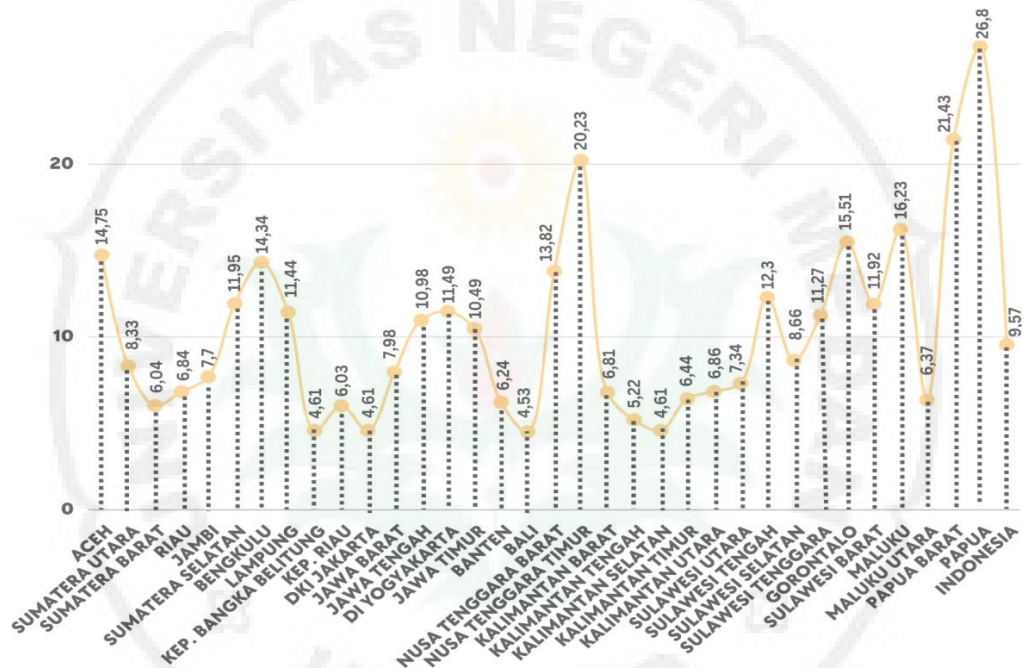
Indonnesia semakin melebar. (Sianturi, 2007).

Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan suatu penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun yang tidak bersifat tidak langsung telah dilaksanakan baik dalam skala nasional maupun lokal. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin dan mengurangi beban biaya bagi rumah tangga yang sangat miskin. (Mahsunah, 2013)

Menurut para ahli ekonomi (Arsyad, 2010) kemiskinan di Indonesia adalah bersifat multidimensial. Kemiskinan yang bersifat multidimensial dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain adalah aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Di lain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang maksimal, dan tingkat

pendidikan yang rendah (Wijayanti, 2005). Berikut adalah posisi relative persentase tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2022 adalah sebagai berikut.

Grafik 1.1 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2022 (%)



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara September 2022 sebesar 8,33 persen yang masih lebih kecil dari angka nasional sebesar 9,57 persen. Provinsi Papua merupakan provinsi tertinggi dengan tingkat persentase penduduk miskin bulan September 2022 sebesar 26,80 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah provinsi Bali sebesar 4,53 persen. Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan tingkat persentase tertinggi di Pulau Sumatera dengan persentase 14,75 persen sangat jauh berbeda dari Kota Medan sebesar 8,33 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 1.1. Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang

terletak dibagian utara pulau Sumatera. Ibu kota Sumatera Utara adalah kota Medan dengan luas wilayah sejauh 72.981,23 Km². Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan pada Tahun 2022 sebesar 8,07 persen, turun 0,27 persen dibandingkan tahun 2021. Masalah-masalah kemiskinan yang terjadi lebih dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan satu dan lainnya. Dalam hal ini, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum.

Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Beberapa hal esensial dalam pembangunan manusia adalah agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak.

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas manusia. Keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi

tercapainya tertib sosial. IPM membahas penduduk pada suatu wilayah memiliki kesempatan memperoleh hasil pembangunan dari haknya untuk mendapatkan pendidikan, pendapatan dan kesehatan. Selain itu IPM juga digunakan mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk dalam kategori negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang.

Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera Utara secara umum terjadi peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Pada tahun 2018 persentase indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara menunjukkan persentase 71,18 %. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 0,56 %. Dan pada tahun 2022 persentasenya menjadi 72,71 %.

Kesenjangan antara kota dengan IPM tertinggi di Sumatera Utara dan yang terendah. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor pembentuk IPM yakni pendidikan (pengetahuan), kesehatan dan standar hidup yang layak. Karena indeks ini memberikan gambaran tentang kemampuan manusia. Semakin banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh tiga hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan masih rendahnya kesejahteraan di daerah tersebut.

Penelitian terdahulu oleh N.W Pardede (2021) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor- Faktor Yang

Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara” dengan menggunakan regresi data panel sebagai metode analisisnya. Ditemukan hasil yakni pertumbuhan ekonomi memengaruhi IPM secara negatif dan signifikan dan Belanja Langsung per Kapita memengaruhi IPM secara positif dan signifikan. Selanjutnya keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Belanja langsung Perkapita terhadap IPM sebesar 97,70% dan sisanya 2,30% dijelaskan faktor lain.

Pengangguran menjadi indikator pengukur derajat kemiskinan, apabila pengangguran meningkat pada suatu negara tertentu, maka tingkat kemiskinan juga semakin tinggi, dikarenakan rakyat yang diklasifikasikan pengangguran maka tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan primer sehari-hari. Setiap Individu yang berkeluarga masih bergantung pada pendapatan gaji yang mereka dapatkan saat bekerja dan tingkat rata-ratanya masih sangat tinggi (Kurniawan, 2021). Ketika mereka kehilangan pekerjaan, beberapa anggota keluarga harus memotong sebagian dari pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kepentingan keluarga. Jika dicermati lagi, kelas berpenghasilan rendah akan menjadi masalah pokok pengangguran sekarang ini, sehingga fenomena pengangguran akan sangat mudah menggeser statusnya menjadi kelas miskin. Dengan demikian dampak negatif dari pengangguran adalah menurunkan pendapatan masyarakat

(Mohammad & David, 2019), yang pada akhirnya mengurangi tingkat kesejahteraan yang dicapai individu. Merosotnya kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh pengangguran dipastikan akan mempertinggi peluang mereka untuk jatuh ke dalam perangkap kemiskinan disebabkan kurangnya pendapatan (Salsabila dkk., 2021).

Pengangguran saat ini menjadi masalah utama yang harus segera diselesaikan. Masalah pengangguran sampai saat ini masih menjadi perhatian utama disetiap Provinsi khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan pengangguran di negara negara yang sedang berkembang disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan kesempatan kerja daripada pertumbuhan yang cepat dari angkatan kerja. Jumlah pengangguran di indonesia khususnya di Sumatera utara mengalami peningkatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pengangguran dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Pengangguran yang tinggi termasuk ke dalam masalah ekonomi dan sosial, orang-orang yang menganggur suatu saat bisa kehilangan kepercayaan dirinya sehingga dapat menimbulkan tindakan kriminal, perselisihan dengan masyarakat dan sebagainya.

Tingkat Pengangguran Terbuka provinsi Sumatera Utara secara umum terjadi fluktuasi atau turun naik dalam persentase pada periode 2018 sampai dengan 2022. Pada tahun 2018 persentase tingkat pengangguran Sumatera Utara menunjukkan persentase 5,56

% . Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,41 % . Selanjutnya tahun 2020 kembali mengalami peningkatan yakni 6,91 % . Kemudian tahun 2021 turun kembali menjadi 6,33 % . Dan terakhir tahun 2022 juga mengalami penurunan menjadi 6,16 % .

Upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran sama pentingnya dengan menurunkan tingkat kemiskinan. Yacoup (2012) Secara teori, jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan ada kemiskinan.

Lewis menyatakan tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukkan bagi negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis menganggap di banyak negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas. (Sukirno, 2006). Pengangguran memiliki hubungan yang erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Standar hidup yang rendah di manifestasikan dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, bekal pendidikan yang minim, kesehatan yang buruk, atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, dan usia harapan hidup yang relatif sangat singkat dan peluang mendapatkan kerja yang rendah.

Tingginya angka pengangguran biasanya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia ataupun tingginya kriteria rekrutment penawaran kesempatan kerja yang ada. Saat ini banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja yang dengan pendidikan minimal diploma maupun sarjana. Keadaan ini membuat sebagian penduduk tidak mampu dan tidak memiliki kesempatan memasuki dunia kerja sehingga jumlah penduduk miskin yang semakin tinggi juga..

Penelitian terdahulu oleh (Yulia, A. S., 2021) menyatakan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Namun, penelitian oleh (Noor, Z., dan David, K., 2017) mengatakan pengangguran tidak memiliki pengaruh dalam menurunkan kemiskinan. Teori Keynes mengatakan bahwa pengangguran bisa menghambat tercapainya kesejahteraan karena kondisi tersebut membuat seseorang tidak mendapat pemasukan. Akibat hal itu, permintaan agregat juga menjadi menurun dan tingkat konsumsi rendah. Tingkat konsumsi yang rendah ini disebabkan oleh penurunan tingkat upah yang membuat daya beli menurun. Produsen atay sektor perusahaan akan mengalami kerugian sehingga penyerapan tenaga kerja tidak terjadi dengan baik. Ketika penyerapan tenaga kerja tidak terjadi dengan baik maka jumlah pengangguran meningkat dan membuat seseorang tidak memiliki pekerjaan. Akibatnya, pemasukan

pun berkurang sehingga seseorang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan rentan menimbulkan kemiskinan (Hasyim, 2016).

Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 88 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi para pekerja Hal ini dikarenakan salah satu hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah menerima upah. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah Minimum provinsi Sumatera Utara secara umum terjadi peningkatan dalam jumlah rupiah tahun 2018 sampai dengan 2022.

Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 berkisar Rp. 2.132.189. Tahun 2019 Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.303.403. Selanjutnya pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.2.499.423. Pada tahun berikutnya, upah minimum provinsi Sumatera Utara tetap yakni

berkisar Rp. 2.499.423. Dan tahun 2022 upah minimum provinsi kembalimengalamipeningkatan menjadi Rp. 2.522.610.

Kenaikan upah minimum berpengaruh terhadap peningkatan daya beli pekerja sehingga mampu meningkatkan produktifitas. Namun, kenaikan upah minimum mengharuskan pengusaha untuk menyesuaikan tingkat upah yang telah ditetapkan pemerintah. Adanya kenaikan upah minimum ini membuat pengusaha harus mengurasi jumlah tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berusaha meningkatkan upah yang diterima oleh masyarakat meskipun tetap saja menimbulkan permasalahan baru. Perbedaan upah minimum tiap provinsi yang ada di Sumatera Utara memicu terjadinya migrasi penduduk.

Penelitian oleh (Orlida, 2022) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Namun, penelitian oleh (Erliza M., dan Dewi Z. P., 2021) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Teori upah alami menjelaskan bahwa pemberian upah didasarkan kepada standar dari kebutuhan hidup laauk seperti sandang, pangan, papan serta pendidikan yang dalam jangka panjang akan meningkatkan taraf kualitas serta kesejahteraan hidup (Mankiw, 2006).

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di

atas, penulis berpendapat bahwa penting untuk memahami dan melihat bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2018-2022. Maka peneliti mengambil judul penelitian “**Analisis Kemiskinan di Sumatera Utara**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan, namun persentase kemiskinannya yang fluktuasi
2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi naik turun. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan, terjadi kesesuaian antara data dengan teori yang artinya pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
3. Tingkat Upah Minimum di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan, namun persentase kemiskinannya yang cenderung berfluktuasi

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup masalah dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen, variabel dependennya adalah kemiskinan sedangkan untuk variabel independennya menggunakan indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan dalam kurun waktu 2018-2022.
3. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan 33 kab/kota sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan menggunakan metode analisis data panel

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap persentase Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap persentase Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap persentase Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-

2022?

4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum terhadap persentase Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap persentase Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum terhadap persentase Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuanserta masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama mengenai bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum terhadap persentase kemiskinan di Sumatera Utara padatahun 2018-2022.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti dalam masalah yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Serta penelitian ini juga salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan khususnya dalam jurusan Ilmu Ekonomi.

b. Bagi Masyarakat/Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi masyarakat/pemerintah dalam menentukan kebijakan mengatasi masalahkemiskinan diprovinsi Sumatera Utara.

c. Bagi Universitas

Sebagai tambahan rujukan bahan referensi. Dapat memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai topik yang sama